

Determinan Sosial dan Ekonomi Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Bali

Surya Dewi Rustariyuni, Luh Putu Aswitari, I Ketut Suidiana

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Udayana

Abstrak : Tingginya tingkat kemiskinan merupakan cerminan dari banyaknya penganggur yang juga berdampak pada ketimpangan di berbagai bidang. Perbedaan PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan penurunan pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif, untuk menentukan efek langsung dari PAD, DAU, DAK, dan belanja modal, terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk menentukan efek tidak langsung dari pertumbuhan ekonomi terhadap PAD, DAU, DAK, belanja modal, melalui pengangguran dan untuk menentukan efek tidak langsung dari pertumbuhan ekonomi pada PAD, DAU, DAK, belanja modal, melalui kemiskinan. Hasil penelitian yaitu, kemiskinan (jumlah orang miskin) tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sementara tingkat pengangguran terbuka memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU dan kemiskinan (jumlah orang miskin) tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK, dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah 82,4 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data adalah 82,4 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 17,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening DAU terhadap jumlah penduduk miskin (kemiskinan) serta pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung PAD terhadap jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.

Key words: pendapatan asli daerah, kemiskinan, pengangguran

PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan suatu negara/daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut (Christianto, 2013). Tingginya tingkat kemiskinan merupakan cerminan dari banyaknya pengangguran

yang juga berdampak pada ketimpangan dalam berbagai bidang (Setyawati dan Hamzah, 2007). Arini (2008) dalam Paseki, dkk (2014) mengatakan bahwa kemiskinan muncul sebagai akibat dari tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara atau daerah tertentu. Setyawati dan Hamzah (2007) menjelaskan pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja

berhubungan dengan belanja pembangunan.

Hasil penelitian Hatta (2017), Kuswanto dan Dewi (2016), Mustika (2014), Rumahorbo (2014), Paseki, dkk (2014), dan Seran (2012), tingginya pertumbuhan ekonomi akan menekan tingkat kemiskinan. Pramastuti (2018), Hartono dan Masykuri (2017), Adawiyah dan Seftarita (2016), Putri (2015), Panjawa dan Soebagyo (2014), Alghofari (2010), menjelaskan tingginya pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah pengangguran. Rahman (2001), Setyawati dan Hamzah (2007) Adi (2006) menjelaskan perbedaan PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya sendiri dengan tujuan untuk pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat menjadi yang utama, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan dan pengangguran menurun (Paseki dkk, 2014). Oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal melalui kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal melalui pengangguran.

Kabupaten Jembrana, Klungkung, Buleleng, Karangasem, dan Tabanan tercatat

memiliki derajat desentralisasi fiskal yang masih kurang. Sementara itu Kabupaten Gianyar tergolong memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sedang, dan Kota Denpasar tergolong memiliki derajat desentralisasi fiskal yang baik. Satu – satunya kabupaten yang mampu memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sangat baik di Provinsi Bali adalah Kabupaten Badung. Hal ini tidak luput dari potensi yang dimiliki Badung sebagai sentra pariwisata dan merupakan kabupaten dengan PAD terbesar-terbesar di Bali. Analisis lain yang masih terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, rasio ini merupakan pembagian/rasio antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan pinjaman. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma, 2010:77).

Kabupaten Badung memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang paling tinggi, yaitu sebesar 425,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki kemandirian fiskal yang paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya, bahkan mencapai empat kali lipat dari pendapatan diluar PAD. Sementara itu pada kurun waktu yang sama, Kabupaten Bangli tercatat memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan yang paling rendah, hanya 10,45 persen. Hal ini kiranya menunjukkan Pemerintah Daerah Bangli masih belum mandiri secara fiskal dan masih membutuhkan transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah lainnya guna pendanaan kegiatan pemerintahannya. Mengingat peran PAD merupakan salah satu komponen dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, Pemerintah Daerah diharapkan sedapat mungkin mengelola PAD tersebut secara efektif dan efisien. Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Menurut Hairul Aswadi dalam Halim (2001) tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah. Belanja modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan memberikan *multipier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu bentuk dari belanja modal oleh pemerintah daerah, yaitu pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong dan meningkatkan iklim investasi di daerah bersangkutan, sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Ratio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Selama periode 2013 – 2017 rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali menunjukkan trend kenaikan. Namun demikian, rasio belanja modal terhadap total belanja selama 2013 – 2017 tercatat masih berada dibawah 20 persen. Kabupaten Badung memiliki nilai rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah tertinggi yaitu mencapai 27,04 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten Badung memungkinkan Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal lebih besar. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 – 2017. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, rata – rata rasio belanja modal terhadap total belanja terendah tercatat di Kabupaten Tabanan. Walaupun Tabanan termasuk daerah dengan pendapatan daerah yang cukup besar dan berada pada posisi empat besar di tahun 2017, namun dalam kurun waktu 2013 – 2017, rata-rata

rasio belanja modal terhadap total belanja daerahnya hanya mencapai 11,47 persen, lebih kecil daripada Kabupaten Bangli yang notabene merupakan daerah dengan realisasi pendapatan daerah terkecil pada tahun 2017.

Selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2011-2016, persentase jumlah penduduk miskin tertinggi disandang oleh Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 6,61 persen. Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem, disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan kerja (Purba dan Aswitari, 2016). Pernyataan tersebut didukung pula oleh Aimon (2012) serta Putri dan Setiawan (2013), yang menyatakan bahwa pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Rata-rata persentase penduduk miskin terendah disandang oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 1,66 persen yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 2,01 persen dan Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 3,93 persen. Berdasarkan data dalam Tabel 4.4, apabila dilihat dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Kabupaten Badung memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang lebih rendah dibandingkan dengan Kota Denpasar yaitu masing-masing sebesar 2,20 persen dan 2,27 persen.

Tujuan penelitian ini antara lain : (1) Untuk menganalisis pengaruh secara langsung pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2009-2018; (2) Untuk menganalisis pengaruh secara langsung pertumbuhan

ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2009-2018; (3) Untuk menganalisis pengaruh secara tidak langsung pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2009-2018; dan (4) Untuk menganalisis pengaruh secara tidak langsung pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2009-2018.

Metode dan Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbentuk asosiatif dengan bentuk hubungan kausal untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2015: 128). Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh secara langsung PAD, DAU, DAK, dan belanja modal, terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap PAD, DAU, DAK, belanja modal, melalui pengangguran dan untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap PAD, DAU, DAK, belanja modal, melalui kemiskinan. Dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan program SPSS, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen

terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Utama, 2012:159). Pengaruh PAD (X_1), DAU (X_2), DAK (X_3) dan belanja modal (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) serta pertumbuhan ekonomi (Y_3) terhadap kemiskinan (Y_1) dan pengangguran (Y_2) di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali yang diilustrasikan seperti pada Gambar 1. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa PAD, DAU, inflasi dan belanja pembangunan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Koefisien jalur adalah *standardized* koefisien regresi. Koefisien jalur di hitung dengan membuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dalam hal ini persamaan tersebut adalah:

$$Y_3 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_1$$

$$Y_1 = \alpha + \beta_5 Y_3 + \beta_6 Y_2 + e_2$$

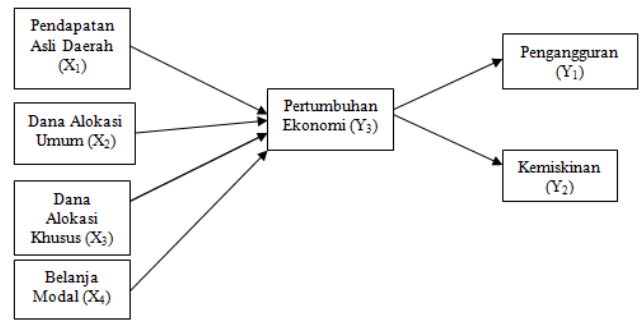
$$Y_2 = \alpha + \beta_7 X_1 + \beta_8 X_2 + \beta_9 X_3 + \beta_{10} X_4 + \beta_{11} Y_3 + e_3$$

$$Y_1 = \alpha + \beta_{12} X_1 + \beta_{13} X_2 + \beta_{14} X_3 + \beta_{15} X_4 + \beta_{16} Y_3 + e_4$$

Keterangan :

- $\beta_{1,2,3,4,5,6}$ = koefisien regresi atau slope
- X_1 = Pendapatan asli daerah
- X_2 = Dana alokasi umum
- X_3 = Dana alokasi khusus
- X_4 = Belanja modal
- Y_3 = Pertumbuhan ekonomi
- Y_1 = Kemiskinan
- Y_2 = Pengangguran
- e = variabel penganggu

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Peneliti, 2019

Hasil Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian struktur pertama yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, memiliki arti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam satu satuan maka, pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,322 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan.

Dana alokasi umum dengan nilai signifikansi $0,280 < 0,05$ menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi dengan anggapan faktor lainnya konstan. Dana alokasi khusus dengan nilai signifikansi $0,010 < 0,005$ menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti setiap kenaikan dana alokasi khusus dalam satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan berkurang sebesar 0,123 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan. Belanja modal dengan nilai signifikansi $0,001 > 0,05$ menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti setiap kenaikan belanja modal dalam satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan berkurang sebesar 0,4 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan. Persamaan struktur satu adalah sebagai berikut:

$$\widehat{Y}_3 = 0,322 \ln X_1 - 0,177 \ln X_2 - 0,123 \ln X_3 - 0,4 \ln X_4$$

S.E.	= (0,076)	(0,163)	(0,047)
	(0,120)		
t - hit	= (4,266)	(-1,087)	(-2,626)
	(-3,329)		
Sig	= (0,000)	(0,280)	(0,010)
	(0,001)		
F-hit	= 15,801	Sig F	=
	(0,000)		
R ²	= 0,426		

Keterangan :

\widehat{Y}_3 = Pertumbuhan ekonomi (persen)
 X_1 = Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)
 X_2 = Dana Alokasi Umum (milyar rupiah)
 X_3 = Dana Alokasi Khusus (milyar rupiah)
 X_4 = Belanja Modal (milyar rupiah)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Pengangguran

Pengujian kedua yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran. Hasil pengujian variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,633 > 0,05$ hal tersebut memiliki arti yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan anggapan faktor lainnya konstan. Hasil pengujian variabel pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka pengangguran akan meningkat sebesar 0,749 persen dengan anggapan faktor lainnya konstan. Persamaan regresi sebagai berikut :

$$\widehat{Y}_3 = -0,003Y_1 + 0,151Y_2$$

S.E.	= (0,007)	(0,045)
t - hit	= (- 0,479)	(3,329)
Sig	= (0,633)	(0,001)
F-hit	= 5,541	Sig F = (0,005)
R ²	= 0,113	

Keterangan :

Y_3 = Pertumbuhan ekonomi (persen)
 Y_1 = Jumlah Penduduk Miskin (persen)
 Y_2 = Pengangguran (persen)

Hasil Pengujian Analisis Jalur

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan antar variabel penelitian, yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Model tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut.

Persamaan struktur 1

$$\widehat{Y}_3 = 0,322 \ln X_1 - 0,177 \ln X_2 - 0,123 \ln X_3 - 0,4 \ln X_4$$

Persamaan struktur 2

$$\widehat{Y}_3 = -0,304 \ln X_1 - 0,303 \ln X_2 - 0,122$$

$$\ln X_3 - 0,36 \ln X_4 - 0,01 \ln Y_2$$

Persamaan struktur 3

$$\widehat{Y}_1 = 0,278 \ln X_1 - 0,166 \ln X_2 - 0,112 \ln X_3$$

$$- 0,269 \ln X_4 - 0,082 \ln Y_2$$

Pemeriksaan Validitas Model

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (e_1)^2 (e_2)^2 (e_3)^2 \\ &= 1 - (0,757)^2 (0,746)^2 (0,743)^2 \\ &= 1 - (0,573) (0,556) (0,552) \\ &= 1 - (0,175) = 0,824 \end{aligned}$$

Keterangan:

R^2_m = Koefisien determinasi total

e_1, e_2, e_3 = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 82,4 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 82,4 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 17,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Hasil Pengujian pengaruh langsung

1) Pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,717 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3). Terdapat hubungan antara

variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini.

2) Pengaruh langsung Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar - 0,118 dan nilai probabilitas sebesar $0,280 > 0,05$ ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Dana Alokasi Umum (X_2) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3). Tidak terdapat hubungan antara variabel Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini.

(3) Pengaruh langsung Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,309 dan nilai probabilitas sebesar $0,010 < 0,05$ hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3). Terdapat hubungan antara variabel Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini.

(4) Pengaruh langsung Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,524 dan nilai probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$ hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Belanja Modal (X_4) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3).

Terdapat hubungan antara variabel belanja modal terhadap pertumbuhan

ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini.

(5) Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,049 dan nilai probabilitas sebesar $0,633 < 0,05$ maka H_1 diterima atau H_0 ditolak, artinya kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

(6) Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,341 dan nilai probabilitas sebesar 0,001 maka H_0 ditolak atau H_1 diterima, artinya pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Uji Sobel atau sering disebut dengan uji pengaruh tidak langsung merupakan cara untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi atau intervening. Oleh karena bertujuan untuk menguji peran suatu variabel, maka model yang digunakan adalah yang tidak standar. Pengaruh tidak langsung variabel independen ke variabel dependen melalui variabel mediasi dihitung dengan cara mengalikan koefisien tak standar jalur variabel independen ke variabel mediasi dengan jalur variabel independen ke variabel dependen. Standar eror untuk koefisien β_1 , β_2 , β_3 , β_4 , ditulis dengan S_{β_1} , S_{β_2} , S_{β_3} , dan S_{β_4} , besarnya standar error tidak langsung dihitung dengan rumus berikut:

- 1) Pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui kemiskinan (Y_1).
Oleh karena z hitung lebih besar dari 0,436 berarti pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung PAD terhadap jumlah penduduk miskin (kemiskinan) di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.
- 2) Pengaruh tidak langsung dana alokasi umum (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui kemiskinan (Y_1).
Oleh karena z hitung sebesar 2,56 lebih kecil dari 8,371 berarti pertumbuhan ekonomi (Y_3) merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung dana alokasi umum (X_2) terhadap jumlah penduduk miskin (kemiskinan) (Y_1) di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.
- 3) Pengaruh tidak langsung dana alokasi khusus (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui kemiskinan (Y_1).
Oleh karena z hitung sebesar 98,576 lebih besar dari 0,147 berarti pertumbuhan ekonomi (Y_3) bukan merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung dana alokasi khusus (X_3) terhadap jumlah penduduk miskin (kemiskinan) (Y_1) di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.
- 4) Pengaruh tidak langsung belanja modal (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui kemiskinan (Y_1).
Oleh karena z hitung sebesar 188,63 lebih besar dari - 0,302 berarti pertumbuhan ekonomi (Y_3) bukan merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung belanja modal (X_4) terhadap jumlah penduduk miskin (kemiskinan) (Y_1) di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.

- 5) Pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui pengangguran (Y_2). Oleh karena z hitung sebesar 0,250 lebih kecil dari 0,664 berarti pertumbuhan ekonomi (Y_3) merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah (X_1) terhadap jumlah pengangguran (Y_2) di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.
- 6) Pengaruh tidak langsung dana alokasi umum (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui pengangguran (Y_2). Oleh karena z hitung sebesar 0,844 lebih besar dari -0,000824 berarti pertumbuhan ekonomi (Y_3) bukan merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung dana alokasi umum (X_2) terhadap jumlah pengangguran (Y_2) di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.
- 7) Pengaruh tidak langsung dana alokasi khusus (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui pengangguran (Y_2). Oleh karena z hitung sebesar 0,221 lebih besar dari 0,136 berarti pertumbuhan ekonomi (Y_3) bukan merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung dana alokasi khusus (X_3) terhadap jumlah

pengangguran (Y_2) di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.

- 8) Pengaruh tidak langsung belanja modal (X_4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui pengangguran (Y_2).

Oleh karena z hitung sebesar 0,425 lebih besar dari -6,343 berarti pertumbuhan ekonomi (Y_3) bukan merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung belanja moda (X_4) terhadap jumlah pengangguran (Y_2) di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2018.

Hasil peroleh hubungan variabel langsung dan tidak langsung serta pengaruh total dari variabel yang diamati pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Hubungan Variabel Langsung dan Tidak langsung serta Pengaruh Total

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y3	
$X_1 \longrightarrow Y_3$	0,322	-	0,322
$X_1 \longrightarrow Y_1$	0,304	-0.00322	0.30078
$X_1 \longrightarrow Y_2$	0,278	0.026404	0.304404
$X_2 \longrightarrow Y_3$	-0,177	-	-0,177
$X_2 \longrightarrow Y_1$	-0,303	-0.00177	-0.30477
$X_2 \longrightarrow Y_2$	-0,166	-0.014514	-0.180514
$X_3 \longrightarrow Y_3$	-0,123	-	-0,123
$X_3 \longrightarrow Y_1$	-0,122	0.00123	-0.12077
$X_3 \longrightarrow Y_2$	-0,112	-0.010086	-0.101914
$X_4 \longrightarrow Y_3$	-0,4	-	-0,4
$X_4 \longrightarrow Y_1$	-0,36	0.004	-0.356
$X_4 \longrightarrow Y_2$	-0,269	-0.0328	-0.3018
$Y_3 \longrightarrow Y_1$	-0,01	-	-0,01
$Y_3 \longrightarrow Y_2$	0,082	-	0,082

Sumber : hasil olah data, 2019

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus dan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dana alokasi umum dan kemiskinan (jumlah penduduk miskin) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 82,4 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 82,4 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 17,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

6. Variabel pertumbuhan ekonomi (Y_3) merupakan variabel intervening dana alokasi umum (X_2) terhadap jumlah penduduk miskin (kemiskinan) (Y_1) dan pertumbuhan ekonomi (Y_3) merupakan variabel intervening pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah (X_1) terhadap jumlah pengangguran (Y_2) di kabupaten/kota provinsi bali tahun 2009-2018.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Dana alokasi umum dan belanja modal sebaiknya digunakan semestinya sehingga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Pemerintah sebaiknya memfasilitasi para pencari kerja dengan memberikan kemudahan membuka akses untuk bekerja di jalur informal sehingga pengangguran dapat teratasi.
- 3) Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di masing-masing kabupaten/kota.

REFERENSI

- Adawiyah dan Seftarita. 2016. Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Perbatasan Timur Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* 1(2) November: 348-357
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi Padang IX Padang*

- Alghofari Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Astrini, Ni Made Myanti dan Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. e-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. 2(8) Agustus: 384-392.
- Bratakusumah, Solihin. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Christianto, Teddy Leasiwal. 2013. Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku. Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi. 7(2) Desember.
- Hartanto, Trianggono Budi dan Masjkuri, Siti Umajah. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. 2(1) Juni: 21-30.
- Hatta dan Azis. 2017. Analisis Faktor Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015. *Jurnal Riset Edisi XIX*. Unibos Makasar Agustus.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Kuswantoro dan Dewi, Indah Giyanti Permata. 2016. Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 6(1) April:18-34. Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mankiw, N. G. 2011. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat
- Mustika, Candra. 2014. Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 1 (4) Oktober : 12-23. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Paseki, Meilen Greri; Naukoko Amran dan Wauran Patrick. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 14 (3) Oktober:30-42. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pramastuti, Niken Anggita. 2018. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 10 Tahun 2013 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2013.
- Rumahorbo Restuty Anggereny. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin.
- Setyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 4 (2) Desember: 211-228.

Seran, Sirilius. 2012. Determinan Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Kemiskinan Penduduk. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 13(2) Juni:62-78.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

----- . 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.

Utama, Suyana. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif (Edisi Keenam)*. Diklat Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.